

## DAFTAR PUSTAKA

- BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI. (2018). *BUKU II: BUKU PEGANGAN FASILITATOR*.
- D. Kemal, A., Kustiani, I., & Alami, F. (2019). Review Design Pekerjaan Struktur  
Proyek Instalasi Rawat Jalan RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek. *JRSDD*, 7,  
281–290.
- Fahrudin, A., Saputro, S. A., Rahmawati, D., & Anggraini, L. (2021). *ANALISIS  
FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK AKIBAT REVIEW  
DESIGN PADA PROYEK KONSTRUKSI*.
- Hellard, R. (1988). *Managing Construction Conflict. Longman Scientific &  
Technical*.
- Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000  
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik  
Indonesia No. 64, 2000*.
- Isa, Rasheed, & Fidelis Emuze. (2015). Stakeholders' Perceptions of Construction  
Dispute Resolution Mechanism in Nigerian Construction.
- Indonesia. (2017). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 11,  
2017*.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021  
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020  
Tentang Perturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Jasa Konstruksi. penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Lembaran  
Negara Republik Indonesia No. 24, 2021*.
- Juherman, Baso. (2017). *KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA  
KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  
PEMERINTAH*.

- Kurniawan, F. (2015). Jenis Sengketa yang Sering Terjadi pada Proyek Konstruksi di Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2015* (pp. 227-232). Surabaya : Universitas Narotama.
- Mochtar, B. (2017). Studi Analisis Terhadap Faktor – Faktor Penyebab Klaim Sengketa Kontrak dan Metode Penyelesaian Sengketa Pada Pelaksanaan Jalan Konstruksi. *Jurnal Kurva S, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. (Vol. 5(2); hal 65 – 71).
- Menteri Pekerjaan Umum. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Muhlis & Mei Lianawati. (2021). *STATISTIK KONSTRUKSI, 2021*.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Pedoman Skripsi Teknik Sipil Untirta (2023).
- R. Subektidan R. Tjitrosudibio. (2006). *KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA*. Jakarta : Pradnya Paramita, 37, 1 – 577.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, XVI, 1.

- Salim H.S., S. H. , M. S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Suyud Margono. (2004). *ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 23.
- Subana, Sudrajat. (2005). *Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Saleh, Nursyam. (2017). *Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Klaim dan Penyelesaiannya Dalam Industri Konstruksi*.
- Saputra, R. Y. (2017). *Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Mall ABC*.
- Sari, S & Irawati, A. (2020). Birokrasi Pancasila. *Jurnal : Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan* (Vol. 2; hal 74 – 83).
- Taurano, G. A., & Hardjomuljadi. S. (2013). Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Proyek Konstruksi Yang Menggunakan Fidic Conditions of Contract for Plant and Design Build. *Jurnal Konstruksia* (Vol. 5(1); hal 14 – 25)